



BANYAK JABATAN STRATEGIS KOSONG

Terkendala Durasi Pelantikan, Tantangan Jalankan Program

YOGYA (KR) - Kepemimpinan Walikota Yogya Hasto Wardoyo dan Wakil Walikota Yogya Wawan Harmawan di fase awal kali ini dihadapkan dengan banyaknya jabatan strategis yang mengalami kekosongan. Prosesi pelantikan pun terkendala seiring regulasi, sehingga menjadi tantangan dalam menjalankan program kerja.

Anggota Komisi A DPRD Kota Yogya Dwi Candra Putra, mengaku komisinya menaruh perhatian serius perihal sumber daya manusia (SDM) dalam mendukung kinerja eksekutif. Hal itu lantaran menjadi salah satu ketugasan Komisi A terkait penyelenggaraan pemerintahan.

"Dalam Undang-undang Pilkada mengamanatkan bahwa kepala daerah atau walikota baru bisa melakukan pelantikan pejabat di lingkungan pemerintahan enam bulan setelah dirinya dilantik sebagai kepala daerah. Kecuali mendapatkan izin dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Hal ini tentu menjadi perhatian khusus mengingat beberapa jabatan strategis di pemerintahan

Kota Yogya banyak yang kosong," paparnya, Minggu (9/3).

Sejumlah pejabat yang kosong antara lain Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Sekretaris DPRD (Setwan), Staf Ahli Bidang Administrasi Pembangunan, Kepala Bagian Kerja Sama, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan, serta sejumlah Mantri Pamong Praja (MPP) atau camat. Tidak hanya pejabat teras saja, sejumlah jabatan struktural di bawahnya juga banyak mengalami kekosongan.

Dwi Candra berharap, kepala daerah sudah mulai melakukan pemetaan pos-pos jabatan yang

kosong tersebut di seluruh jajaran Pemkot Yogya. Pemetaan setidaknya sudah dirampungkan dalam waktu cepat. Dengan begitu sebelum sampai batas ketentuan atau enam bulan setelah Hasto-Wawan dilantik sebagai kepala daerah, sudah ada pejabat berkompoten yang dikantongi.

"Sehingga bisa segera dilakukan akselerasi sebagai wujud pelayanan masyarakat yang prima dan implementasi visi misi Hasto-Wawan yang terangkum dalam Hasta Jogja Mulia dengan pengisian pejabat yang kompeten," imbuhnya.

Hasto-Wawan dilantik sebagai walikota dan wakil walikota terhitung sejak 20 Februari 2025 lalu. Oleh karena itu merujuk pada UU Pilkada, yang bersangkutan baru bisa melantik pejabat teras pada akhir Agustus, 2025 mendatang. Meski demikian Hasto-Wawan juga memiliki opsi lain untuk mengajukan izin ke Mendagri agar bisa melakukan rotasi atau pelantikan pejabat lebih awal. Tentunya, seluruh

proses tersebut harus didahului dengan mekanisme pengisian pejabat yang mengedepankan manajemen talenta.

Menurut Dwi Candra, kekosongan jabatan merupakan sisi yang penting untuk diperhatikan. Hal ini mengingat pengambilan keputusan terkadang menjadi kendala dalam akselerasi program. Apalagi Kepala BKPSDM dan Kepala DLH karena konsentrasi utama visi misi atau program kerja Hasto-Wawan adalah peningkatan SDM baik masyarakat maupun ASN di pemerintahan, juga penanganan masalah sampah.

Dalam beberapa kesempatan Pak Hasto sering menyampaikan jika Yogya tidak memiliki sumber daya alam sehingga SDM lah yang harus dioptimalkan. Makanya BKPSDM memiliki peran penting. Begitu pula terkait percepatan penanganan sampah yang membutuhkan kiprah sentral dari DLH. Akan tetapi kedua organisasi ini jabatannya masih kosong dan hanya diisi oleh pelak-

sana teknis (Plt)," urainya.

Tidak hanya itu, pada tahun 2026 mendatang juga akan ada sejumlah pejabat teras setara eselon II yang akan pensiun. Salah satunya Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Yogya yang bakal purna per tanggal 1 Januari 2026. Hal itu pun harus bisa menjadi perhatian agar kelak jangan sampai banyak diisi oleh Plt. Sedini mungkin proses regenerasi turut disiapkan agar setiap yang purna bisa langsung mendapatkan pengganti.

"Jangan sampai nanti banyak diisi oleh Plt, sehingga ada beberapa hal yang tidak bisa diputuskan segera mengingat Sekda merupakan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (Baperjakat). Apabila sudah disiapkan dari sekarang, kebiasaan pengisian jabatan yang kosong dengan Plt dapat dihindari dan akselerasi program visi misi walikota dapat segera terwujud," tandasnya. (Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005